

Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik di DKI Jakarta ditinjau dari Teori Collaborative Governance = Analysis of the Implementation of Goods and/or Services Tax Collection on Electricity Tax in DKI Jakarta in view of the Collaborative Governance Theory

Kanaya Maharani Hermawan Ismail, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920572089&lokasi=lokal>

Abstrak

Penerimaan pajak dari Tenaga Listrik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya di DKI Jakarta, mengingat tingginya konsumsi listrik di wilayah tersebut. Peran PT PLN (Persero) dalam pemungutan pajak listrik sangat krusial, karena PLN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan listrik, tetapi juga sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam memastikan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ditinjau dari teori collaborative governance dan menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PBJT-TL di DKI Jakarta sudah memenuhi dimensi teori collaborative governance dengan kepercayaan yang baik antara PLN dan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemimpin telah berhasil memfasilitasi kerja sama antar lembaga, dengan komunikasi dan koordinasi yang lancar, serta komitmen dan kesepahaman mengenai target pemungutan pajak sudah dipahami oleh kedua pihak. Namun, pelanggan yang menunggak pembayaran dan transparansi masih menjadi hambatan dalam pemungutan PBJT-TL. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak listrik masih dapat ditingkatkan, terutama dengan pengembangan pajak atas listrik yang dihasilkan sendiri dan sosialisasi yang lebih intensif.

.....Electricity tax revenue is a crucial source of Local Revenue (PAD) for the Regional Government, particularly in DKI Jakarta, due to the high electricity consumption in the area. PT PLN (Persero) plays a key role in this tax collection process, as it not only serves as the electricity provider but also acts as the primary partner of the local government in ensuring the smooth implementation of its tax collection. This study aims to analyze the implementation of the collection of Certain Goods and/or Services Tax on Electricity in terms of collaborative governance theory and analyze the opportunities and obstacles faced in collecting PBJT-TL in DKI Jakarta. The research method used the post-positivist paradigm qualitative approach with qualitative data collection techniques through literature studies and field studies. The results showed that the implementation of PBJT on electricity in DKI Jakarta has fulfilled the dimensions of collaborative governance theory with good trust between PLN and the DKI Jakarta Regional Revenue Government in increasing local tax revenue. Leaders have successfully facilitated inter-agency cooperation, with smooth communication and coordination, and commitment and understanding of the tax collection target have been understood by both parties. However, delinquent customers and transparency continue to be obstacles for PBJT-TL collection. On the other hand, opportunities to increase local revenue through electricity tax can still be improved, especially with the development of taxes on self generated electricity

and more intensive socialization.